

SINERGITAS PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA

M Syaiful Suib

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo

syaifulsuib@gmail.com

Abstract :

The concept of this study examines the Synergy of Pondok Pesantren's Role on the Improvement of Human Development Index (IPM) in Indonesia. Calculation of HDI standard include life expectancy, education level and standard of living of a region is in accordance with national standardization. This research is a qualitative research to collect data relating to the construction of conceptual thinking of the researcher is how the components, ways to overcome and what strategy will be done by PP to increase HDI in certain area that become its territory. Based on the data obtained the level of HDI in Indonesia is still low, this is due to the community's response to development is still not maximal, therefore the Government to further increase the HDI in the region, it is necessary cooperation with Pondok pesantren. Surely the role of this PP will have a positive impact on the increase of HDI in the region and become a reference for the stakeholders to utilize and increase the HDI in the region through boarding school. Broadly speaking, HDI will increase if education, health and other areas, there is a response from the community and contribute to the community. This opportunity will provide added value to the increase of HDI through the role of Pondok Pesantren.

Key words : Pondok Pesantren, IPM

Pendahuluan

Pondok adalah berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari Bahasa Arab “*funduq*” yang berarti asrama, penginapan atau hotel. (Muhdlor, 1996)

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para santri/siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap siswa/santrinya. Figur kiai merupakan peran sentral bagi kelangsungan operasional pondok pesantren dari segi pengajaran, pendidikan maupun kebutuhan ekonomi santri. Pesantren juga menyediakan masjid sebagai sarana ibadah, belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Pesantren telah melahirkan intelektual intelektual di negeri Indonesia. (Dhofier, 2001)

Dalam sejarah pesantren di Indonesia pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel perkiraan abad 15. Sebagai pusat dakwah ajaran islam disebut dengan Pesantren Ampel Denta bertempat di Surabaya sekarang. Kata Sunan berasal dari Suhu Nan artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Artinya beliau mampu mengajak masyarakat yang pada waktu itu mayoritas agama Hindu dan Budha untuk mengikuti ajaran agama Islam. Peran Maulana Malik Ibrahim kemudian Sunan Ampel dan sunan yang lain berkembang menjadi tranmisi keilmuan Islam yang berkembang disaentero Nusantara melalui jalur yang dikenal dengan sebutan nama Walisongo. (Arif, 1996)

Awalnya pondok pesantren merupakan pusat pengembangan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun dalam perkembangannya pondok pesantren bukan hanya aspek spiritual akan tetapi memperlebar kepada akses pada aspek politik, sosial, budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek politik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, Pondok pesantren memegang peranan sangat fitil dengan adanya Resolusi jihad yang dikomandoi oleh Pengasuh PP Tebuireng (KH Hasyim Asy'ari) melawan tentara sekutu dengan bermodalkan senjata tradisional (bambu runcing). (AULA, 2015) Pesantren juga melahirkan terbentuknya Komite Hijaz pada tahun 1924 di Surabaya yang secara khusus hendak memperjuangkan penafsiran-penafsiran dan praktek-praktek keberagaman Islam kontekstual, inklusif, pluralistic dan sesuai dengan kodrat ekologisnya yang terancam pemberangusan oleh paham Wahabi yang mementingkan Pan Islamisme, Uniformitas dan dalam batas-batas tertentu mirip dengan globalisasi. (Efendi, Mr, 2005)

Indonesia sejak era reformasi tahun 1998, mengalami berbagai perubahan-perubahan mendasar dengan arus yang sangat cepat dan penuh gejolak, semakin menjauhkan dari tujuan semula untuk mensejahterakan rakyat. Problem-problem yang ada seperti pengelolaan keuangan Negara, korupsi yang sistemik, silang sengkret tata niaga produk pertanian, cacat UU/RUU yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan sebagainya, semakin memberikan jelas kondisi bangsa ini. Mulai di sadari bahwa kemunculan problem-problem tersebut tidak semata disebabkan oleh *human error* atau *euphoria* kebebasan” semata, melainkan juga berkaitan dengan bentuk tujuan dan ideologi yang mengendalikan arah proses berbangsa dan bernegara, yang salah satunya adalah kekuatan modal asing yang mengendalikan, disamping juga ada kekuatan –kekuatan lain. (Maula, 2014)

Kelebihan Pondok Pesantren adalah disamping merupakan instansi atau lembaga pendidikan keagamaan yang memadukan sistem pengajaran tradisional dan

modern berafiliasi kepada Departemen Pendidikan dan Departemen Agama yang dikelola dan ditangani oleh pemegang otoritas utama yang tersentral kepada seorang kiyai, juga merupakan tempat mencurahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap keberadaan eksistensi pesantren sebagai wadah kekuatan moral di masyarakat menghadapi tantangan zaman dan pada berikutnya secara fungsional organisatoris kelembagaan ini juga akan menjadi tanggung jawab pemegang otoritas utama yaitu seorang kiai.

Sosok kiai (pengasuh pondok) sebagai seorang pemimpin dipesantren yang lebih luas dalam terminologi ushul fiqih dikenal prinsip “ *tashborrof al – imam ‘alaa al-ra’yyah manuutun bi al-maslahab*; kebijaksanaan dan tindakan imam (pemimpin) harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Sosok ini yang menjalankan hanya dari figur kiai berasal dari komunitas pesantren yang mempersentasikan dari seorang ulama sebagai pewaris para Nabi, juga berfungsi sebagai jihad fisabilillah (*Jihad fisabilillah* ini dalam maknanya berjuang di jalan Allah, dalam arti luas dimaknai sebagai perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah kejahilan (kebodohan) menuju manusia yang bermartabat) (NU, 1428) dengan jalan mengangkat derajat kemanusiaan dan mensejahterakan ummat/masyarakat. (Jazuli, 2011)

Dalam perjalanannya, beberapa peran Pondok Pesantren dengan misi syiar islamiyah dan peningkatan kualitas keilmuan santri berupaya semaksimal mungkin melakukan inovasi-inovasi konstruktif dan tindakan-tindakan riil untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan kondusif dengan cara-cara menggali informasi variatif dari masyarakat. Peran untuk memberdayakan manusia ini menjadi prioritas dari sebuah pesantren bagaimana membentuk manusia dan mempersiapkan kepribadiannya yang matang dan siap terjun ditengah-tengah masyarakat.

Hakikat sebuah pembangunan pada dasarnya tidak semata mata dilihat dari aspek material saja, melainkan perlu diikuti dengan pembangunan aspek sumber daya manusianya (SDM). Tujuan dari sebuah pembangunan daerah (wilayah) adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dari berbagai segi, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diciptakanlah suatu standar penghitungan keberhasilan pembangunan aspek manusianya yang di sebut IPM (Indek Pembangunan Manusia). Perhitungan standar IPM (IPM dikenalkan pertama kali oleh lembaga PBB, yaitu UNDP singkatan *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB, yang setiap tahun menerbitkan laporan mengenai IPM Negara-negara di dunia, tugasnya adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia) meliputi angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan standart hidup suatu daerah sudah sesuai dengan standarisasi kelayakan hidup secara nasional. (Tambunan, 2015)

IPM seringkali menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, ini direpresentasikan dari perpaduan aspek fasilitas yang ada dan sejauh mana respon masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut. Semisal pembangunan fasilitas sekolah dalam jumlah yang besar diikuti dengan penambahan fasilitas dan tenaga yang memadai akan mampu meningkatkan pendidikan masyarakat, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga dibidang ekonomi, dengan adanya penambahan fasilitas pada ekonomi, akan

berdampak pada pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, akan tetapi hasil yang di peroleh tidak sesuai dengan tujuan dan harapan.

Masalah kemiskinan di Indonesia, masih menjadi PR bagi Pemerintah yang perlu menjadi perhatian serius. Ada beberapa factor penyebab, diantaranya adalah masih tinggi angka penduduk miskin, mulai dari program kemiskinan dalam realisasi yang belum terlaksana sesuai harapan, adanya masyarakat yang lebih memilih miskin saat pendaftaran, angka inflasi yang tinggi serta biaya hidup yang tinggi.” (Bromo, 2016)

Tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia bisa di bilang cukup tertinggal. Berdasarkan pemeringkatan literasi internasional, *Most Literate Nations in the World*, yang diterbitkan Central Connecticut State University Maret 2016 lalu, Indonesia berada di urutan ke-60 diantara total 61 negara atau peringkat kedua dari bawah. Kondisi ini menjadi keprihatinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Anies Baswaden saat itu. Indonesia hanya lebih baik daripada Botswana. Posisi paling atas diduduki Finlandia, kemudian disusul Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia dan Swiss. Melalui gerakan literasi yang dicanangkan oleh Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap minat dan daya baca di Indonesia tumbuh subur, caranya melalui pembiasaan membaca diawal jam sekolah selama 15 menit, juga lewat gerakan literasi yang dilakukan komunitas-komunitas pendidikan masyarakat. (Pos, 2016) Beberapa faktor buta aksara disebabkan sejumlah faktor diantaranya, faktor budaya berupa cara berfikir masyarakat yang masih belum mengetahui pentingnya sekolah, ekonomi yang rendah. (Bromo, 4, 2016). Angka harapan hidup atau lama hidup manusia didunia adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam disuatu wilayah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan warga suatu wilayah. (Bromo, 8, 2016)

Permasalahan ini membutuhkan dukungan semua pihak terutama adalah sosok kiai, ulama’, umara, pendidik serta segenap tokoh masyarakat. Peran pondok pesantren dalam meningkatkan ekonomi, kesehatan, sosial, budaya sangat terasa dan besar dampak positifnya bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya PR besar bagi stakeholder (pemerintah) dan juga bagi pondok pesantren sebagai tempat penyiapan kader bangsa. Peluang ini kemudian ditangkap oleh Pondok Pesantren, yang salah satu perannya adalah penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), garapannya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar IPM akan meningkat apabila dalam suatu wilayah bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang yang lain bermutu akan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Peningkatan dari berbagai bidang yang bermutu akan memberikan nilai tambah terhadap IPM itu sendiri dan Pondok Pesantren menyadari betul bahwa persoalan yang ada di masyarakat ini tidak sederhana dan sangat kompleks, mulai dari masalah sosial, politik, ekonomi dll.

Dilihat dari output yang dihasilkan Alumni dari berbagai Pondok Pesantren, peran alumni pesantren mendominasi diberbagai bidang sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, karyawan, guru, petani, pedagang, dan lainnya. Salah satu langkah antisipatif yang memberikan nilai positif adalah sektor pemberdayaan dan pembentukan karakter masyarakat. Sebagai signifikasi pelaksanaan metodologi secara efektif dan efisien terhadap pemberdayaan kepada masyarakat, PP mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan dibentuknya BPPM (Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat), bukan hanya bergerak pada sektor

ekonomi tetapi mencakup berbagai bidang garapan seperti pemberdayaan perempuan, pemuda, dan juga pendampingan diberbagai bidang seperti pendampingan hukum, sosial, kesehatan, keagamaan dan lain sebagainya.

Disamping itu juga dibentuk beberapa lembaga-lembaga pendidikan untuk menunjang dan mempersiapkan santri sesuai dengan skill keahlian yang dimiliki dan pendidikan di Pondok Pesantren telah berdiri berbagai macam lembaga pendidikan, mulai pendidikan tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi, dalam bidang sosial dibentuk lembaga panti asuhan, Yayasan Bantuan Sosial (YBS), yang memberikan bantuan dari biaya pendidikan sampai kepada biaya hidup di Pondok Pesantren. Dibidang ekonomi dibentuk lembaga ekonomi seperti pendirian BMT, minimarket, Kopontren, POM Bensin, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah maupun swasta dan instansi-instansi yang lainnya melakukan berbagai pelatihan-pelatihan yang melibatkan santri dan masyarakat. Dibentuknya lembaga-lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan kaderisasi santri dan masyarakat untuk menjawab tantangan diberbagai bidang pada masa yang akan datang.

Berawal dari dasar pemikiran inilah PP bukan hanya sebagai lembaga yang secara fungsional mempunyai garapan preventif dan kuratif, akan tetapi berfungsi juga sebagai pengembangan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan juga sebagai media pelatihan ketrampilan (skill) kepada santri dan masyarakat sekitar. Disamping itu juga peran pesantren secara tidak langsung akan berfungsi sebagai sarana pendukung bagi pemerintah untuk merencanakan program-program di daerah-daerah yang menjadi garapannya, yang dalam hal ini beberapa program tersebut sejalan dengan pemerintah untuk menuju masyarakat Indonesia yang rahmat al l'alamin.

Konsep IPM

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dengan hubungan dengan manusia lainnya. Sosiologi sebagai salah satu ilmu yang membahas tentang peranan manusia didalam kehidupan bermasyarakat telah memaparkan berbagai macam teori-teori hubungan manusia satu dengan lainnya.

Dalam teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons, pendekatan teori ini adalah melihat masyarakat secara utuh baik fungsi dan prosesnya yang di pengaruhi oleh keteraturan masyarakat di Amerika. Dalam teorinya Parson menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. (Dwi Susilo, Rahmat K, 2008: 107). Komponen utama pemikiran Parson adalah adanya proses defrensiasi. Bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan struktur maupun fungsionalnya bagi masyarakat luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi merupakan pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan system. Pertama : adaptasi (*adaptation*), penyesuain diri, Kedua : pencapaian tujuan (*goal attainment*), Ketiga, integrasi (*integration*), system mengatur bagian-bagian yang menjadi komponennya. Keempat, pemeliharaan pola (*latensi*). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. (Soekamto, 1986)

Dari pemaparan teori Talcott Parsons, IPM merupakan salah satu subsistem yang dapat dipakai dari teori ini untuk lebih dikembangkan dalam beberapa aspek seperti aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan aspek lainnya sebagai tonggak untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas berdasarkan pola-pola perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Konsep IPM di Indonesia ini didasari oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dan Pancasila Sila Kelima yang berbunyi, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pembukaan UUD 1945 berisikan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsekuensi nilai keadilan pada Pancasila sila kelima tersebut berwujud dalam hidup bersama meliputi salah satunya keadilan *distributive* yaitu suatu hubungan keadilan terhadap warganya dalam arti negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat/warga, memberikan bantuan, kesempatan hidup didasarkan pada hak dan kewajiban, pendidikan, kesehatan dan lain lain. (Zubaidi, 2012)

Human capital (modal/sumber daya manusia) sebagai persiapan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya adalah cadangan bakat, keahlian dan pengetahuan yang dapat memperkuat daya tawar-menawar (gaji/pendapatan) di pasaran tenaga kerja. Ini dibagi dua yaitu umum dan khusus. Modal manusia umum berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi potensi (gaji/pendapatan) seseorang dalam pekerjaan dan profesi secara umum, sedangkan modal manusia khusus, yang mempengaruhi gaji seseorang dalam perusahaan tertentu dimana mereka bekerja tanpa memperhatikan nilai gaji di lain perusahaan. (Kuper, 2000)

Konsep pembangunan manusia yang paling urgen adalah terpusat pada manusianya dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (*kapabilitas*) manusia, akan tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara maksimal. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Untuk mengukur itu diperlukan suatu alat ukur yang disebut IPM. IPM adalah indek pembangunan manusia (*Human Development Index/HDI*) di kaji meliputi pengukuran angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan standart hidup suatu daerah sesuai dengan standarisasi kelayakan hidup secara umum yang ditetapkan pada suatu daerah. (Tambunan, Mr, 2015)

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* s), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. MDG merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun belakangan ini banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP) *The Economics of Democracy: Financing Human Development* (BPS,2007) dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu

memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaannya. (Salah satu usaha yang dilakukan oleh UNDP adalah menciptakan indeks taraf pembangunan Negara maju dan berkembang berdasarkan kepada sifat-sifat dari delapan belas jenis data yaitu tingkat harapan hidup pada waktu lahir, konsumsi protein hewani perkapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah, persentase anak yang belajar di sekolah kejuruan, jumlah surat kabar, telepon, radio, jumlah penduduk kota diatas 20.000 jiwa, persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian, persentase tenaga kerja di berbagai bidang, persentase kerja upahan, persentase PDB, konsumsi energy perkapita, konsumsi listrik perkapita, konsumsi baja perkapita, nilai perkapita perdagangan luar negeri, produksi pertanian, dan pendapatan perkapita Produk Nasional Bruto). (Sukirno, 2011)

Penghitungan IPM dikembangkan oleh pemenang Nobel dari India Amartya Sen, ekonom Pakistan Mahbub Ul-Haq serta dibantu Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics) pada tahun 1990. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. (Probolinggo, 2016)

IPM seringkali menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, ini direpresentasikan dari perpaduan aspek fasilitas yang ada dan sejauh mana respon masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut. UNDP mengukur IPM/HDI dengan pencapaian rata-rata sebuah Negara dalam 3 dimensi dasar, yaitu; (Kuncoro, 2004)

1. *Longevity*, hidup sehat dan panjang umur diukur dengan harapan hidup saat kelahiran/*life expectancy of birth* dan angka kematian perseribu penduduk/*infant mortality rate*. Melihat keadaan yang ada di kabupaten/kota di Indonesia dan 26 Provinsi dihitung dengan menerapkan metode tidak langsung (Metode Brass, varian dari Trussel) berdasarkan variable rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlah rata-rata anak yang tetap hidup.
2. *Educational achievement*/ Pengetahuan (pendidikan) diukur dengan dua indikator yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun keatas (*the mean years of schooling*). (Ada beberapa tujuan pendidikan menurut para ahli ; Froebel 1852, seorang idealis yang mistis, merumuskan pendidikan sebagai proses yang terdiri dari memimpin manusia sebagai makhluk berfikir, agar tumbuh kesadaran terhadap diri sendiri (*self conscious* –sadar dan bebas, tentang kehendak Tuhan serta mengajarnya tentang cara dan sarana menuju kepada-Nya. Herbart (meninggal tahun 1841), paham realistik, tujuan pendidikan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan (*science*), yang bersifat menyeluruh, filsafat, seni dengan diiringi oleh perasaan etis dan simpati kepada masyarakat (dalam kelembagaan) serta perasaan simpati kepada Tuhan (agama). Bertrand Russell lahir 1872, tujuan pendidikan diarahkan kepada pengembangan empat sasaran potensial manusia, yaitu *vitalitas*, *intelektualitas*, *sensitivitas* dan keberanian (*courage*). Seorang pemikir Islam, Dr Mohammad ‘Athiyah al-Abrasyi berpendapat tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan akhlakul karimah yang merupakan fadhilah dalam jiwa anak didik, sehingga anak akan terbiasa dalam berperilaku dan berfikirnya secara rohaniah dan insaniah berpegang pada moralitas tinggi, tanpa memperhitungkan keuntungan material semata.). (Arifin, 2012) Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek

huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka umur 15 tahun ke atas digunakan karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Biasanya penduduk yang berusia kurang 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini mencerminkan tingkat pengetahuan penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. *Access to resource*, Standard kehidupan layak (ekonomi) diukur dengan PDB perkapita dengan terminology *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan kerja. Ini juga bisa dilihat dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara pada satu tahun tertentu. (Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu, secara konseptual disebut PDB). (Sukirno S. , 2011). Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). Komponen standar hidup layak diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil perkapita yang disesuaikan. UNDP memakai PDB perkapita dengan perhitungan paritas daya beli (PPP USS) sebagai perbandingan internasional komponen ini. Prosedur untuk menghitung konsumsi riil perkapita yang disesuaikan sebagai berikut :

- a. Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita dari SUSENAS untuk setiap provinsi dan kabupaten (=A)
- b. Mendeflasi nilai A dengan indek harga konsumen (IHK) provinsi dan kabupaten (=B) dengan beberapa penyesuaian untuk kabupaten dimana harga tidak berkumpul
- c. Menghitung paritas daya beli perunit (PPP/unit) dengan menggunakan Jakarta sebagai standar
- d. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C)
- e. Menyesuaikan nilai C dengan menerapkan formula Atkinson untuk mengukur utilitas marginal C.

PPP/unit dihitung dengan menggunakan formula (persamaan) :

$$PPP/Unit = (\sum E (I,j)) / (\sum P (9,j) * Q (I,j))$$

Di mana :

E (I,j) ; Pengeluaran untuk komoditas ke-j pada provinsi ke-i

P (9,j) ; Harga komoditas di Jakarta

Q (I,j) ; Jumlah komoditas j (unit) yang di konsumsi di provinsi ke-i

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut ;

$$\text{Indek } X(i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Keterangan ;

X (i) : indicator ke-I (I = 1,2,3); X(i)maks : nilai maksimum X(i), X(i) min : nilai minimum X(i).

Indikator komponen IPM menurut standar UNDP dalam tabel sebagai berikut (Kuncoro, Mr, 2004);

Tabel.I
Nilai IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup	25	85
Angka Melek Huruf	0	100
Rata-rata Lama sekolah	0	15
Purchasing Power Parity (Konsumsi perkapita yang disesuaikan)	300.000	732.720

Sumber: BPS, 2007

Menurut (Mudrajad, 2003) penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-1,0 yang terdiri dari:

Kategori rendah : Nilai IPM 0-0,5
Kategori menengah : Nilai IPM antara 0,51-0,79
Kategori tinggi : Nilai IPM 0,8-1

Berdasarkan prosedur diatas, HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ;

$$HD = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$$

Di mana :

X1 ; Indek Harapan Hidup Kelahiran

X2 ; Indek Pendidikan = 2/3 (indek melek huruf) + 1/3 (indek rata-rata lama sekolah)

: X3 ; Indek standar hidup layak/ paritas daya beli

Permasalahan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan . Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu IPM atau Human Development Index (HDI).

Jadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik. IPM identik dengan menghitung pembangunan manusia dilihat dari aspek yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, indeks kesehatan

dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks ekonomi dilihat dari daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.

IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitive dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan. IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan : 1. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. 2. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 3. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk . 4. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia. (Kuncoro, Mr, 2004)

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan diantaranya komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, pola pengeluaran masyarakat, komposisi pendapatan nasional, perbedaan masa lajang, keadaan pengangguran. (Sukirno S. , Mr, 2011)

Keberhasilan dalam menaikkan IPM pada Negara berkembang merupakan prestasi yang membanggakan. Beberapa ciri-ciri Negara berkembang yaitu: tingkat kemakmuran relative rendah, produktifitas pekerja sangat rendah, tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia di Negara berkembang khususnya di Indonesia diperlukan beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan, diantaranya : 1. Produktifitas penduduk harus meningkat dan berpartisipasi penuh dalam proses menentukan pendapatan dan kebutuhan hidupnya. 2. Pemerataan penduduk harus merata dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, sehingga mereka berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 3. Kesenambungan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. 4 Pemberdayaan penduduk harus berpartisipasi pada proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan. (Sukirno S. , Mr, 2011)

Pada bulan September 2000 PBB mendeklarasikan apa yang disebut tujuan pembangunan millennium (MDGs), yang harus dicapai oleh 191 negara pada tahun 2015. Ada delapan sasaran dan masing-masing dengan target tertentu yang harus dicapai dan sasaran pertama adalah mengurangi kemiskinan dan orang-orang yang mengalami kelaparan. Kedelapan sasaran tersebut adalah sbb : (Tambunan, Mr, 2015)

1. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2. Mencapai pendidikan dasar semua
3. Mengurangi angka kematian anak
4. Memperbaiki kesehatan ibu

5. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya.
6. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
7. Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan.

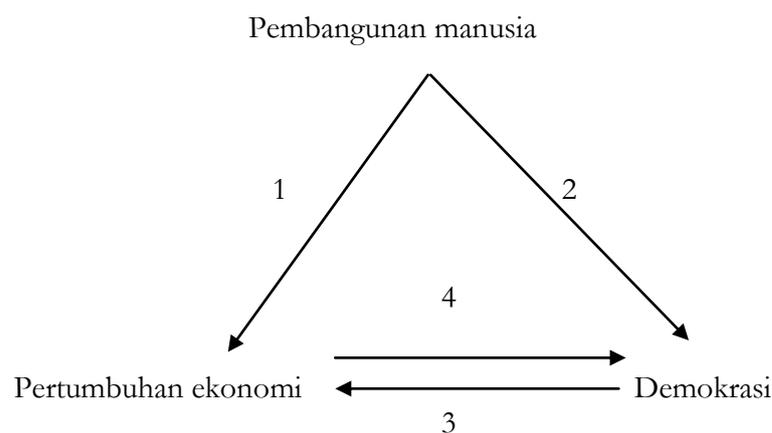
Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor riil tersebut. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Selain dari sisi anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM yakni apabila jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM.

Hal ini terjadi karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu implikasinya akan dapat menurunkan IPM.

Keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan konsolidasi demokrasi telah dilakukan beberapa studi dan kajian beragam, dikutip dari Mudrajat hal 115-117, seperti beberapa analisis di bawah ini ;

Pembangunan manusia mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan melalui konsolidasi demokrasi. Tingkat melek huruf yang tinggi, kesehatan yang baik, dan kesamaan kesempatan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu konsensus atas tujuan pembangunan (hubungan 2). Demokrasi yang partisipasif merupakan alat yang efektif bagi pengumpulan suara dan resolusi konflik yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas politik dan social.

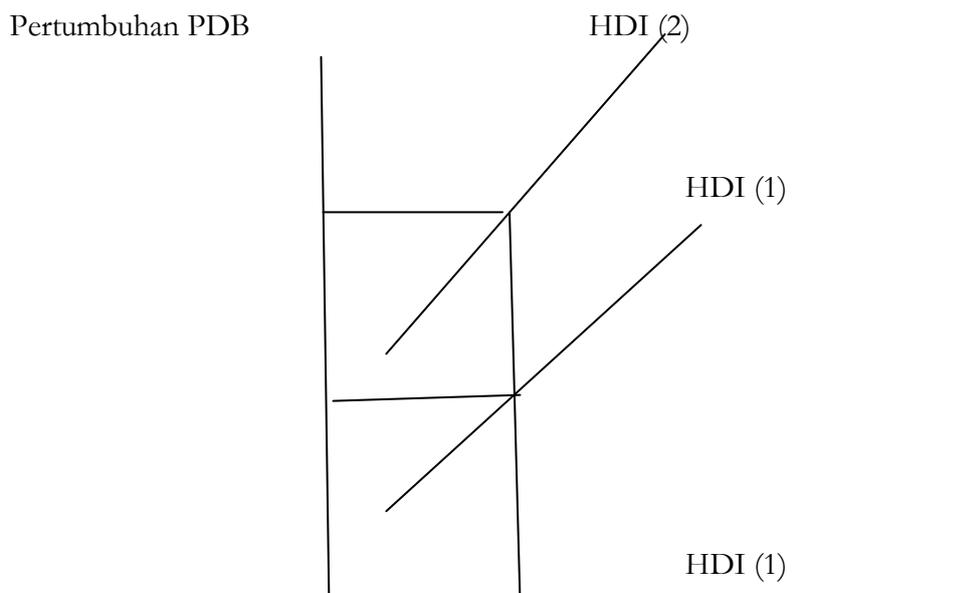
Gambar 1
Virtuous Triangle



Sumber : UNSFIRS (2000)

Pembangunan manusia bertindak sebagai *variable* antara (*shift variable*) dalam hubungan antara ekonomi dan demokrasi. Dengan berinvestasi pada pembangunan manusia, sebuah daerah dapat bergerak ke arah pendapatan perkapita yang lebih tinggi dengan tingkat demokrasi tertentu melalui efek pertumbuhan langsung. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi semakin kuat berkat kenaikan HDI.

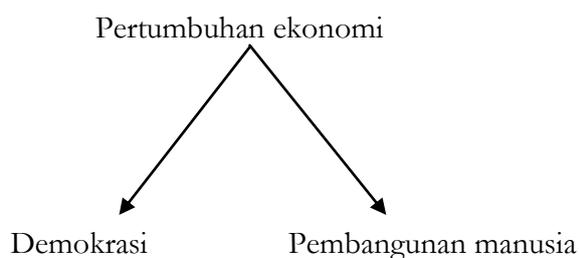
Gambar 2 ;
HDI, Demokrasi dan Tingkat pendapatan



Sumber : UNSFIRS (2000)

Demokrasi dalam literature konvensional, sering dipandang barang mewah artinya permintaan akan demokrasi meningkat sejalan dengan naiknya tingkat pendapatan perkapita. Yang terkait dengan hal ini adalah *hipotesis cruel choice* antara demokrasi dan disiplin. Karena demokrasi pada tahap awal pembangunan bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka disiplin lebih dibutuhkan oleh sebuah Negara dalam keadaan tersebut daripada demokrasi, ini dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (1994).

Gambar 3
Cruel Choice Plus Trickle Down

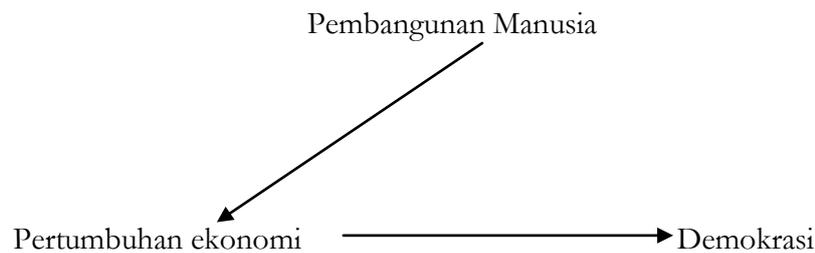


Sumber : UNSFIRS (2000)

Journal homepage: www.jurnalnu.com

Model pertumbuhan Endogen menyediakan kerangka alternative untuk meneliti hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi antar Negara yang dilakukan oleh Barro menemukan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori “*human capital*” (Barro, 1991).

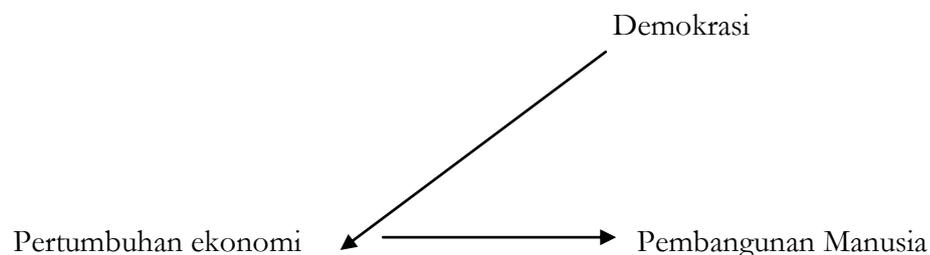
Gambar 4
Pertumbuhan Endogen dan Demokrasi



Sumber : UNSFIRS (2000)

Balla mempunyai perspektif lain. Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan. Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan pendekatan “*trickle down*” terhadap pembangunan. Perhatianannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada pembangunan manusia.

Gambar 5
Virtual Circle versi Bhalla



Dari beberapa analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi memerankan sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Perubahan struktur perekonomian Negara berkembang seperti di Indonesia, menurut analisis Chenery dan Syrquin, ada beberapa ciri-ciri untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakatnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut ; (Sukirno S. , Mr, 2011)

1. Peningkatan tabungan dan pembentukan modal
2. Kenaikan pendapatan pemerintah
3. Pendidikan merata
4. Peningkatan struktur permintaan domestic
5. Peningkatan struktur produksi
6. Peningkatan struktur perdagangan
7. Optimalisasi penggunaan tenaga kerja
8. Meminimalisir Urbanisasi, tingkat kelahiran dan tingkat kematian
9. Pemerataan distribusi pendapatan

Istilah manusia sebagai sumber daya pembangunan, pada hakikatnya adalah ; nilai manusia ditentukan oleh potensinya dalam system produksi ekonomi. Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diterjemahkan sebagai pendidikan untuk berproduksi. Itu sebabnya manusia yang lahir atau yang kemudian cacat sehingga tidak mendapat perhatian negara, seakan-akan mereka tidak tergolong dalam pengertian warga Negara yang memperoleh hak kependidikan yang dijamin oleh oleh konstitusi (Surakhmad, 2009).

Studi yang dilakukan oleh Frederich Harbison dan Charles A. Mayers (Education, Manpower, and Economich Growth, 1964) mengemukakan sebuah cara mempersepsi manusia yang tidak semata-mata menentukan harga manusia hanya sejauh berupa nilai material yang dihasilkan, akan tetapi menekankan pentingnya pendidikan pada pembangunan ekonomi. Karena dengan pendidikan akan membangun dan membentuk karakter manusia yang handal dan tentunya akan meningkatkan ekonominya juga. (*The building of modern nation depend upon the development of people and the organization of humant activity. Capital, natural resource, foreign aid, and international trade, of course, play important role in economic growth, but none is more important than manpower.....All studies of development recognize the imoortance of the human factor; our fouceses upon human resource as the point of departure.* (Surakhmad, Mr, 2009). Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

Strategi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang dan pemberi pelayanan kepada rakyat harus mempunyai rencana dan strategi untuk mencapai tujuan bersama yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 28 UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Strategi dan kebijakan pemerintah dalam kebijakan nasional dapat diklasifikasikan dalam RPJM. Dasar skala-skala RPJM pemerintah dirumuskan sebagai berikut (MNDP, 2010, hal 1-23) (Tambunan, Mr, 2015):

1. RPJM pertama 2005-2009, diarahkan pada reformasi dan pembangunan Indonesia disemua bidang yang bertujuan untuk menciptakan sebuah Indonesia yang aman, damai adil, dan demokratis dan yang memiliki sebuah populasi yang kesejahteraannya terus meningkat.
2. RPJM kedua, 2010-2014, bertujuan pada perluasan konsolidasi dari reformasi di Indonesia disemua bidang dengan memberi penekanan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk mendorong pembangunan kapasitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperkuat daya saing ekonomi
3. RPJM ketiga, 2015-2019, diarahkan pada konsolidasi yang lebih besar dari pembangunan ekonomi dalam suatu acara yang konferhensif disemua bidang dengan penekanan pada pencapaian daya saing ekonomi nasional yang tinggi berdasarkan daya saing dari sumber daya alam (SDA) dan kaulaitas yang baik dari SDM dan dengan kemampuan yang terus bertambah dalam penguasaan IPTEK.
4. RPJM keempat, 2019-2025, bertujuan merealisasikan sebuah masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui akselarasi dari proses pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan struktur ekonomi yang terealisasi yang lebih kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ditanah air, dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Strategi pemerintah pada tahun 2011 dengan mengeluarkan kebijakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. RKP 2011 diarahkan mencapai tujuan tujuh sasaran utama ; 1) Menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energy. 2) Perlindungan sosial melalui BOS dan jamkesmas. 3) Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri. 4) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. 5) Perbaikan kesejahteraan aparatur Negara dan pensiunan. 6) Penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran dan 7) pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu. (Tambunan, Mr, 2015)

Salah satu upaya secara optimal dan maksimal untuk meraih keberhasilan yang akan dicapai, diperlukan peran dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat salah satunya adalah pesantren, untuk mewujudkan Indonesia yang bersaing global.

Pendidikan dan latihan, migrasi, dan perbaikan gizi dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Sumarsono, 2003 :49, dikatakan pendidikan, kesehatan, gizi yang baik atau lebih luas lagi adalah modal manusia (*human capital*), dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari investasi manusia, menyebabkan akumulasi modal manusia dan

pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. (Nawawi, 2013)

Setiap pembangunan harus berkaca pada budaya masyarakat setempat. Budaya merupakan landasan kegiatan masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan sehari-harinya. Kebiasaan ini bisa di pengaruhi factor geografis wilayah mereka bertempat tinggal. Pembangunan yang berlandaskan budaya akan direspon oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan membentuk sikap, sikap akan membentuk watak yang pada akhirnya akan membentuk karakter. Dari karekter inilah masyarakat akan merespon pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan respon yang positif. (Sholeh, 2008)

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

1. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi criteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk membedakan dua lembaga (Negara) yang tingkat pendapatan perkapitanya tidak sama dapat memiliki IPM yang berbeda
3. Untuk memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tertentu dan dicarikan pemecahan masalah (solusinya).

Pondok Pesantren dan IPM

Pondok Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para santri/siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap siswa/santrinya. Figur kiai merupakan peran sentral bagi kelangsungan operasional pondok pesantren dari segi pengajaran, pendidikan maupun kebutuhan ekonomi santri. Pesantren juga menyediakan masjid sebagai sarana ibadah, belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Pesantren telah melahirkan intelektual-intelektual yang mumpuni di negeri Indonesia dan diakui oleh dunia. (Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, 2001)

Pesantren sebagai pusat transmisi Islam Nusantara mencerminkan pengaruh asing bercampur dengan tradisi lokal yang ada. Ulama'/kiai kemudian berkembang membentuk jaringan intelektual yang berkesinambungan sejak abad 15 hingga abad 21. Jaringan intelektual ini terbentuk berupa ; 1) Kancah, pola dan sifat jaringan, (Kancah, Pola dan sifat jaringan ini seperti masjid, halaqoh (study Circles, lingkaran belajar) sebagai pusat transmisi keilmuan, rantai intelektual (intellectual chains) dilakukan secara terus menerus. Seorang kiai/ulama' tidak akan memiliki status dan popularitas hanya karena kepribadian yang dimilikinya, akan tetapi karena dia ada yang mengajarnya (gurunya). Jadi hubungan jaringan ini terbentuk karena hubungan-hubungan personal). 2) Inti dan karakter jaringan, (Inti jaringan dan karakter, pertama periode awal jaringan di bentuk oleh Wali Songo, membentuk halaqoh, pengajian rutin dan manjadi pusat penyebaran Islam. Perkembangan selanjutnya merangkul kekuasaan dan ikut terlibat didalam pembentukan kekuasaan (kerajaan). Misalnya sebagai panglima perang dan penasehat raja. Karakter dasar yang dibangun dengan berusaha mengakomodasi dan mengadaptasikan Islam kedalam tradisi local

masyarakat setempat. Adat istiadat yang sudah lama dipraktekkan masyarakat tidak dibabat habis, akan tetapi diberikan warna keislaman sehingga terjadi akulturasi antara Islam dan budaya local. Kedua, menghubungkan jaringan ulama' internasional dengan regional. Hal ini dapat di lihat adanya tarekat-tarekat yang berasal dari ulama' timur tengah diadopsi dan dipraktekkan oleh jaringan ulama' regional. Ketiga, transmisi keilmuan yang diteruskan oleh sejumlah intelektual yang lebih beragam daerahnya pada abad 18. Karya-karya ulama' Indonesia diakui oleh kalangan ulama' internasional.) 3). Signifikansi jaringan dalam perkembangan intelektual Islam di Nusantara. (Signifikansi jaringan yang terbentuk ini terbagi dalam 3 kecenderungan. Pertama ; hampir seluruh intelektual Islam pada masa pertumbuhan adalah penulis-penulis produktif dan diakui ulama' internasional. Kedua, kegiatan yang dilakukan mereka dalam institusi-institusi sosial keagamaan dan pendidikan umat tersebar keseluruh nusantara. Ketiga, jaringan yang dibentuk tidak saja kepada masyarakat secara umum, tetapi kepada para penguasa sebagai bagian dari efektifitas jaringan ini). (El-Saha, 2003)

Dari jaringan ulama ini kemudian pesantren sebagai kekuatan moral masyarakat mempunyai tiga fungsi, pertama; sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama (*centre of excellent*), kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, ketiga sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Setelah masa kerajaan-kerajaan Nusantara, Belanda mulai menguasai daerah-daerah di kepulauan Nusantara melalui pemerintahan pedagang Hindia- Belanda atau dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) yang berlangsung pada tahun 1596 hingga abad ke -19. (Nasution, 2010). Sekitar abad 15 Masehi, Indonesia telah dijajah oleh bangsa asing, wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah ruah dan letak strategis dari zona eksklusif dan penduduk pribumi yang masih bersahaja telah mengundang sejumlah bangsa asing untuk singgah – bahkan menetap – di wilayah tersebut, semisal Tionghoa, India, Arabia, Persia dan Eropa dan menjadi lahan perebutan oleh pihak asing. Kemudian Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan pernyataan kehendak bangsa Indonesia menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan: berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang budaya. (Nasution, Mr, 2010)

Pengaruh budaya asing yang sejak lama dirasakan bangsa Indonesia tentunya akan berpengaruh terhadap tata kehidupan dan perilaku pada rakyat Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang besar harus melakukan langkah-langkah untuk membentengi dari semua aliran baik budaya, sosial dan diperlukan beberapa pencerahan terhadap eksistensi rasa kebangsaan yang tinggi diantaranya: pertama bahwa Indonesia merupakan hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan bersama, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama dan golongan. Kedua, untuk menanggulangi pengaruh budaya luar diperlukan suatu bentuk nilai yang menjadi tolak ukur eksistensi keberagaman budaya yang ada di Indonesia.

Penjajahan di Indonesia maupun kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Dari gerakan kultur kepemudaan dari beberapa daerah seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes, dll terdorong berkembangnya bibit nasionalisme dalam perkumpulan kepemudaan menjadi satu kesatuan pengenal dengan kata Indonesia. Gerakan politik dan pendidikan yang

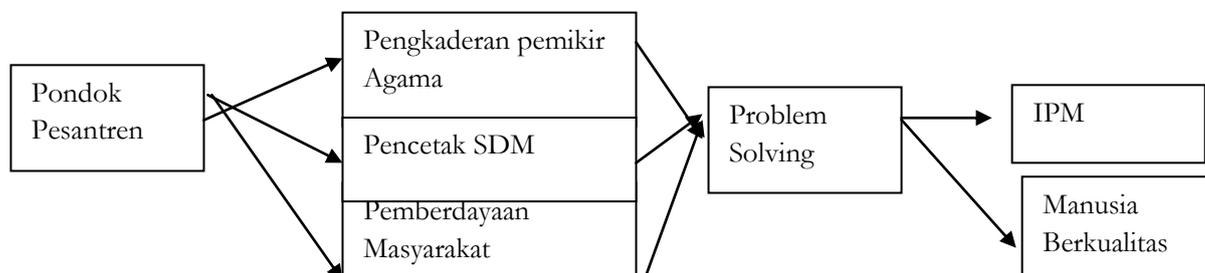
muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional" oleh beberapa pemuda-pemuda Indonesia diantaranya Budi Utomo, Dokter Wahidin Sudiro Husodo dan Dokter Sutomo. Kemunculannya ini memberikan semangat kebangkitan kepada para pemuda dan terus menyebar - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916, Serikat Dagang Islam (SDI) oleh H Samanhudi, Serikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan nama "*Nahdlatul Fikri*" (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Kemudian berkembang lagi berasal dari kelompok saudagar namaya *Nahdlatul Tujjar* (pergerakan kaum saudagar). (Madjid, 2004). Gerakan-gerakan ini berawal dari pondok pesantren yang sebelumnya telah berdiri di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu.

Awalnya pondok pesantren merupakan pusat pengembangan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun dalam perkembangannya pondok pesantren bukan hanya aspek spiritual akan tetapi memperlebar kepada akses pada aspek politik, sosial, budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek politik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, Pondok pesantren di Indonesia memegang peranan sangat vital dengan adanya Resolusi jihad yang dikomandoi oleh Pengasuh PP Tebuireng (KH Hasyim Asyari) melawan tentara sekutu dengan bermodalkan senjata tradisional (bambu runcing). (AULA M., 2015). Pesantren juga melahirkan terbentuknya Komite Hijaz pada tahun 1924 di Surabaya yang secara khusus hendak memperjuangkan penafsiran-penafsiran dan praktek-praktek keberagaman Islam kontekstual, inklusif, pluralistic dan sesuai dengan kodrat ekologisnya yang terancam pemberangusan oleh paham Wahabi yang mementingkan pan islamisme, uniformitas dan dalam batas-batas tertentu mirip dengan globalisasi. (Efendi, Mr, 2005)

Pesantren merupakan model tempat proses transmisi ilmu yang dikembangkan melalui *halaqoh*, *kuttab*, *zamiyah* yang berasal dari Haramain (Mekkah dan Madinah). Cikal bakal pesantren sudah ada sejak Islam tersebar di Nusantara dalam bentuknya yang bermacam-macam ; masjid, halaqah, rumah guru (*kuttab*), dan madrasah (sekolah) yang kemudian berkembang menjadi pesantren seperti sekarang ini. (El-Saha M. H., 2003)

Peran pondok pesantren dalam menentukan arah kebijakannya melalui penerbitan serangkaian regulasi untuk mengatur berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kerangka pemikiran yang di bangun dalam penelitian ini adalah melalui tiga fungsi pondok pesantren, pertama; sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama (*centre of excellent*), kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, ketiga sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari ketiga fungsi ini diketahui bukan hanya menaikkan IPM akan tetapi dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas.

Table III
Kerangka pemikiran



Strategi pesantren dalam menjalan misi dakwah, pendidikan dan sosialnya yang mengedepankan hidup harmoni dan damai, menjadikan pesantren secara umum tidak mudah terpancing untuk terlibat dalam berbagai konflik sosial, sehingga kehadirannya tidak mengalami resisten. Para kiai sebagai *agent of sosial change* lebih menggunakan pendekatan cultural, bukan hegemoni politik structural, apalagi menggunakan tindakan arogansi dan kekerasan. Budaya utama pesantren ini, membuka ruang terciptanya sikap atau karakter toleran para santri terhadap keberagaman (*pluralitas*) dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat dan sosok kiai yang sangat dihormati dan diteladani (*uswah*) oleh masyarakat akan lebih diterima petuah-ajarannya. Hal ini yang di lakukan oleh PP sebagai basis massa yang berorientasi kepada kepentingan akhirat (perjuangan demi tegaknya agama Islam) bagaimana dapat dijadikan pilot projek bagi masyarakat serta menjadi tumpuan, harapan dan cita-cita untuk menatap masa depan yang cerah melalui Pondok Pesantren. (Romli, 2016)

Peran yang dilakukan oleh PP bukan hanya sebagai lembaga yang secara fungsional mempunyai garapan *preventif* dan *kuratif*, akan tetapi berfungsi juga sebagai pengembangan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan juga sebagai media pelatihan ketrampilan (*skill*) kepada santri dan masyarakat sekitar dan yang lebih penting sebagai *problem solving* (pemecahan berbagai macam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat). Disamping itu juga peran pesantren secara tidak langsung akan berfungsi sebagai sarana pendukung bagi pemerintah untuk merencanakan program-program di daerah-daerah yang menjadi garapannya, beberapa program tersebut sejalan dan bersinergi dengan pemerintah untuk menuju masyarakat Indonesia yang rahmatat lil'alamini.

Kesimpulan

Pondok Pesantren telah mempersiapkan santri-santrinya untuk siap terjun di masyarakat di berbagai bidang. Hal ini dilihat dari Implementasi yang telah dilakukan diantaranya mencakup tiga fungsi pesantren yaitu pertama sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama (*centre of excellent*), kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, ketiga sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Peran lain yang dilakukan oleh PP bukan hanya sebagai lembaga yang secara fungsional mempunyai garapan *preventif* dan *kuratif*, akan tetapi berfungsi juga sebagai

pengembangan dan pemberdayaan kemasyarakatan, sebagai media pelatihan ketrampilan (skill) kepada santri dan masyarakat, dan yang lebih penting sebagai *problem solving* (pemecahan masalah dari berbagai macam persoalan kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat).

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pesantren dalam meningkatkan IPM adalah dengan misi dakwah, pendirian lembaga pendidikan, keterampilan, kerjasama semua pihak baik dengan lembaga pemerintah, swasta dan dalam kehidupan sosialnya mengedepankan hidup harmoni, damai, jauh dari konflik serta pendekatan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Zuhdi, Ahmad, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika
- Arif, Maskur, 2003, *Sejarah Lengkap Walisongo*, Jogjakarta, DIPTA
- Arifin, H Muzayyin, 2012, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Barton, Greg, 2010, *Biografi Gus Dur the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta, LKies Printing Cemerlang
- Dhofier, Zamakhsari, 2001, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta, LP3S, KDT
- H A, Jazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- H Kaelan, MS & Zubaidi, H Achmad, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma
- Iqbal, Muhammad & Nasution, Husein, Amin, 2010, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- Karim, Adiwarmanto, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica, 2000, *The Sosial Science Encyclopedia*, terjemah Haris Munandar, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, et.al Ed. 1 Cet 1. Jakarta Raja Grafindo, Persada.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang)*, Jogjakarta, Erlangga
- Madjid, Nurcholish, 2004, *Indonesia Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Mastuki HS dan El-Saha, M Ishom, 2003, *Intelektualisme Pesantren (Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren)*, Jakarta, Diva Pustaka
- Maula, M Jadul, 2014, *Kembali ke Khittob 1945, Negara Republik Indonesia adalah Negara Islamnya Ummat Islam Indonesia menurut Nahdhotul Ulama'*, dalam Khittob dan khidmah NU, Majma' Buhuts an –Nahdiyyah, Pati, Jawa Tengah

- Nawawi, Ismail, 2013, *Isu Nalar Ekonomi Islam 1*, Sidoarjo, Dwi Putra Pustaka
- Rosyada, Dede, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis (sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan)*, Jakarta, Kencana
- Sholeh, Rahman, Abdul, 2008, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana
- Seokemto, Soerjono, 1986, *Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta, Rajawali
- Sukirno, Sadono, 2011, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*, Jakarta, Kencana
- Surakhmad, Winarno, 2009, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara
- T.H. Tambunan, Tulus, 2015, *Perekonomian Indonesia, Era Orde lama hingga Jokowi*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Wijaya, Aksin, 2012, *Menusantarakan Islam*, Jakarta, Nadi Pustaka
- Bisri Effendi, *Pesantren, Globalisasi dan Perjuangan Subaltan*, Jurnal an-Nufus, vol.4 no.2 Nopember 2005
- Mursyid, Desertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016
- Risalah, Edisi IV/Tahun 1/Sya'ban 1428 H
- Majalah AULA PWNU Jatim, Resolusi Jihad “ *Panglima Perang 10 November 1945*, Edisi Nopember 2015
- Radar Bromo, Sabtu 21 Mei 2016, “ *Kemiskinan Masih Tinggi (Kependudukan)*”
- Jawa pos, Rabu, 13 April 2016, “ *Literasi*”
- Radar Bromo, Selasa, 12 April 2016, “ *Angka Buta Aksara Masih Tinggi*”.
- Radar Bromo, Rabu, 24 Agustus 2016, “ *Harapan Hidup Naik Jadi 66,15 Tahun*”
- Jawa Pos, Jum'at, 22 Juli 2016, *Indek Pendidikan Kembali Duduki Peringkat 33*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.